

artikel ikhsan

by Sansan Turnitin

Submission date: 27-Dec-2023 09:45PM (UTC-0600)

Submission ID: 2265105162

File name: Artikel_Ikhsan_2.docx (34.07K)

Word count: 3648

Character count: 24310

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN
(STUDI KASUS PENGELOLAAN SUNGAI KUIN)**

Ahmad Nur Ikhsan¹, Dewi Merdayanty², Junaidy³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 19120050

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1104017302

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1102088702

E-mail: ahmdnrkhsann@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin khususnya Sungai Kuin, (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi terhadap Perda No. 15 Tahun 2016. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya (1) pada implementasi kebijakan Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin berdasarkan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan lancar, (2) adapun faktor pendukung dari implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin yaitu sebagian besar masyarakat sungai sudah teredukasi akan pentingnya sungai sebagai ruang hijau, adanya kegiatan rutin Pasukan Turbo dalam pemeliharaan Sungai Kuin serta ada bantuan lain dari Lingkungan Hidup yaitu kegiatan Peduli Sungai yang mana bertujuan pemeliharaan sungai-sungai di Banjarmasin. Kemudian faktor penghambat, yaitu dalam pelaksanaannya yaitu sebagian kecil masyarakat yang masih belum lepas dari kegiatan sosial budaya yang merugikan Sungai Kuin, sehingga dirasa perlunya edukasi berkepanjangan dalam menyelesaikan kendala tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Perda No. 15 Tahun 2016; Sungai Kuin

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2016 on efforts to improve river management in Banjarmasin city, especially the Kuin river, (2) identify the inhibiting and supporting factors in the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2016 concerning the Kuin river.

The research method used in this study is qualitative research, data collection was carried out through observation, interviews, and documentation of Regional Regulation No. 15 of 2016. Data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that (1) the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2016 concerning the Kuin river based on 4 factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, has been going smoothly, (2) the supporting factors in the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2016 concerning the Kuin river are that the majority of river communities have been educated about the importance of the river as a green space, the routine activities of the Turbo Task Force in maintaining the Kuin river, and other assistance from the Environment Department, namely the River Care activity which aims to maintain rivers in Banjarmasin. As for the inhibiting factors, they are related to certain small segments of the community that are still engaged in cultural and social activities that harm the Kuin river, thus necessitating continuous education to address these obstacles.

Keywords: Public Policy; Regional Regulation No. 15 of 2016; Kuin River

PENDAHULUAN

Masyarakat urban Banjarmasin pada masa lampau menaruh ketergantungan yang sangat besar terhadap sungai sebagai elemen krusial dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan memastikan kelangsungan hidup. Dalam waktu tersebut, sungai menjadi pusat vitalitas bagi masyarakat Banjar. Meskipun demikian, kondisi dan konteks kehidupan masyarakat pada era tersebut nampaknya tidak mampu menjadi dorongan utama dan faktor pendorong bagi warga Kota Banjarmasin pada zaman sekarang. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari perluasan pemukiman penduduk saat ini dan adopsi pola hidup yang bersifat konsumtif.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kawasan hidup sesungguhnya bukanlah perih yang baru. Pemicu munculnya permasalahan kawasan tersebut antara negeri maju serta negeri tumbuh bukanlah sama. Di Negara-negara maju, pemicu utama biasanya merupakan limbah-limbah industri semacam merkuri serta gas beracun, sementara di negara-negara tumbuh semacam Indonesia biasanya merupakan limbah rumah tangga. Sungai merupakan air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih besar ke tempat yang lebih rendah serta menuju maupun bermuara ke laut.

Permasalahan pencemaran lingkungan menjadi tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh sekelompok warga yang menetap di suatu kawasan tertentu. Jenis pencemaran melibatkan udara, air, dan tanah, dan hal ini terus terjadi dalam berbagai konteks geografis. Keadaan sungai di Kota Banjarmasin, yang merupakan inti kehidupan masyarakat, mengalami penurunan kualitas yang ditandai oleh warna yang semakin gelap dan kedalaman yang berkurang. Pemanfaatan sungai sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, buang air besar, dan memasak semakin terancam oleh limbah industri dan rumah tangga.

Kondisi yang paling terdampak adalah sungai-sungai kecil yang kini kehilangan tepian karena dihuni oleh pemukiman penduduk. Walaupun Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan peraturan hukum yang melarang pembuangan sampah sembarangan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, serta Perda Nomor 9 Tahun 2008 yang juga menegaskan larangan membuang sampah ke sungai, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menanggulangi permasalahan ini.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin, terjadi dampak yang signifikan terhadap keadaan sungai dan pemanfaatannya. Kepala Badan Zona Hidup (BLHD) Kalimantan Selatan menyatakan bahwa permasalahan pokok terkait sungai di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya mencakup terjadinya sedimentasi (pendangkalan), penyempitan, dan pencemaran air sungai, serta penurunan kecepatan arus air sungai selama pasang surut. Dalam usaha untuk menjaga kelestarian sungai, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menggalakan beberapa Peraturan Daerah (Perda), di antaranya adalah Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Peraturan Daerah ini diumumkan dan mulai berlaku pada 6 Oktober 2016. Dengan pemberlakuan Perda ini, diharapkan bahwa sungai di Kota Banjarmasin dapat dijaga keberlanjutannya. Faktor yang menarik perhatian adalah bahwa Kota Banjarmasin, sebagai satu-satunya wilayah yang menerapkan sistem otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, memegang peranan penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif menganalisis suatu objek, fenomena, setting sosial yang akan jabarkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam penelitian kualitatif ini berisi kutipan fakta yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan pada penelitian.

Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penjelasan penulis mengambil daerah Sungai Kuin di Banjarmasin karena permasalahan terkait sungai penulis temukan di Banjarmasin, sehingga sangat penting untuk penulis mengangkat permasalahan Sungai Kuin ini.

Guna memperoleh dataset yang relevan dan komprehensif, studi ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yang melibatkan wawancara sebagai metode utama. Dalam kerangka wawancara, peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur, di mana pertanyaan telah disusun sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara yang difokuskan pada subjek wawancara, yakni Kepala Bidang Sungai dan Kepala UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Selanjutnya, observasi turut dilibatkan dalam penelitian ini, dengan peneliti secara langsung mengamati kondisi Sungai Kuin di Banjarmasin dan mengadakan wawancara singkat dengan satu individu yang tinggal di sekitar sungai. Hal ini dianggap sebagai elemen penilaian yang memperkuat kevalidan hasil penelitian. Selain itu, pendekatan dokumentasi juga diimplementasikan, merujuk pada informasi atau catatan terstruktur. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada catatan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sungai dan Kepala UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin, yang menjadi bagian integral dari usaha peningkatan pengelolaan sungai di Banjarmasin.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan aktor atau informan guna mendapatkan data. Aktor atau informan merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan atau berpengaruh terhadap topik penelitian yang sedang diteliti. Aktor atau informan sering kali memiliki pengetahuan, pengalaman,

atau perspektif yang diperlukan untuk memahami masalah yang sedang diteliti. Aktor atau informan penelitian dapat berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki peran yang berbeda dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini informan berjumlah dua orang yaitu Kepala Bidang Sungai dan Kepala UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam upaya peningkatan pengelolaan sungai di Banjarmasin.

Analisis data pada penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni sebagai berikut; reduksi data, pada tahap pertama data yang diperoleh dari para informan dan yang lain akan direduksi dengan cara merangkum, memilah hal yang penting dan membuang yang tidak perlu; penyajian data, pada tahap kedua setelah data direduksi maka dilakukan sajian data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami; kesimpulan dan verifikasi, pada tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin pada Sungai Kuin

Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin dirancang dalam rangka untuk menjadi acuan dalam upaya peningkatan pengelolaan sungai di Banjarmasin. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, diperlukan adanya tahapan-tahapan yang melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kunci sukses karena pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi mereka. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari 2 informan yaitu terdiri dari dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, bahwasanya bentuk implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin terkhusus di Sungai Kuin, terhadap faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan ialah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi (pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, dapat disimpulkan bahwa dalam faktor komunikasi melalui kegiatan perencanaan, terdapat langkah penting yang dilakukan yaitu sosialisasi kebutuhan program kerja kepada berbagai pihak terkait. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan pemahaman yang sama dan mendapatkan masukan serta persetujuan dari berbagai stakeholder terkait dengan kebutuhan dan tujuan program kerja yang sedang direncanakan. Dengan melakukan sosialisasi ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait, sehingga program kerja dapat dijalankan dengan efektif dan mendapatkan dukungan yang luas.

b. Sumber Daya

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya. Sumber daya menjadi hal penting karena menjadi faktor utama penggerak implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, disimpulkan bahwa faktor sumber daya pada pelaksanaan implementasi yaitu berupa sumber daya manusia yang memadai. Hal ini terlihat pada bidang-bidang implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 pada pengelolaan Sungai yang meliputi bidang perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dalam berbagai aspek tersebut, kebijakan publik ini dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran proses, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan ini mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas lingkungan

sungai, memperbaiki infrastruktur terkait, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada Sungai tersebut.

c. Disposisi

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik ialah disposisi. Disposisi kebijakan publik mengacu pada sikap atau kecenderungan tertentu yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan atau pejabat pemerintah terhadap sebuah kebijakan publik atau isu tertentu. Disposisi ini mencerminkan pandangan atau orientasi mereka terhadap suatu masalah, dan dapat mempengaruhi cara mereka merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi memegang peranan penting dalam pemeliharaan Sungai Kuin, khususnya terkait dengan penerapan Perda No. 15 Tahun 2016 dalam aspek pemeliharaan. Disposisi di sini merujuk pada sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh pemerintah terkait dalam menghadapi tugas pemeliharaan sungai tersebut.

Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas lingkungan Sungai Kuin, pemerintah mengambil langkah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perawatan. Satgas ini menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan secara terencana, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2016.

d. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik. Hal ini karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin telah diatur dengan jelas dan terperinci. Dalam upaya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengklasifikasikan bidang-bidang kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pengaturan struktur birokrasi yang terstruktur dan jelas ini memiliki banyak manfaat. Pertama, memastikan bahwa setiap aspek dalam penataan dan pemeliharaan kota memiliki pemangku kepentingan yang bertanggung jawab secara spesifik, sehingga tidak ada bagian yang terlupakan atau terabaikan. Kedua, memperkuat koordinasi antar unit, sehingga kerjasama dan sinergi antar bidang dapat tercapai dengan lebih baik. Selain itu, pengaturan struktur birokrasi yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Dengan tanggung jawab yang jelas, penilaian kinerja dapat dilakukan lebih objektif, dan masyarakat dapat lebih mudah memantau hasil kerja dari masing-masing bagian Dinas PUPR.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin

Dalam setiap program pastinya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaannya. Peneliti membagi kedua poin tersebut dan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah segala hal atau kondisi yang membantu, mendukung, atau memfasilitasi suatu proses, kegiatan, atau tujuan agar mencapai hasil yang diinginkan. Faktor pendukung dapat berperan sebagai pendorong positif dalam mencapai kesuksesan, kemajuan, atau efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bisnis, pendidikan, hubungan sosial, lingkungan, dan proyek-proyek lainnya. Identifikasi dan pemanfaatan faktor pendukung menjadi penting dalam merencanakan strategi dan tindakan yang tepat untuk memaksimalkan potensi dan mengoptimalkan keberhasilan suatu usaha atau kegiatan.

Faktor pendukung disini ialah diartikan sebagai hal-hal yang mendukung pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase, didapatkan kesimpulan bahwa pada implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin, faktor pendukung tercapainya program kerja dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan kali ini keterlibatan masyarakat berperan penting bagi pemerintah daerah dengan berkolaborasi bersama terutama dalam pemeliharaan Sungai Kuin. Bukti nyata dukungan masyarakat sekitar Sungai Kuin yaitu kebanyakan mereka sudah tereduksi akan pemeliharaan sungai sebagai ruang hijau yang mana kini mereka sudah tidak nyaman berdiam diri atau membangun rumah di bantaran Sungai Kuin.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah segala hal atau kondisi yang menghalangi, menghambat, atau menyulitkan suatu proses, kegiatan, atau tujuan dari mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penghambat bisa muncul dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, pendidikan, hubungan interpersonal, lingkungan, maupun dalam berbagai

proyek atau usaha lainnya. Identifikasi dan pemahaman terhadap faktor penghambat sangat penting dalam merencanakan strategi dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang muncul.

Faktor penghambat disini diartikan sebagai kendala jalanya Perda No. 15 Tahun 2016 terhadap Sungai Kuin. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Ahli Muda Teknik Pengairan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2016 terkait Sungai Kuin menghadapi kendala dari sebagian kecil masyarakat yang masih menjadi faktor penghambat dalam pemeliharaan sungai tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan sosial budaya yang tidak dapat dihindari sepenuhnya di sekitar bantaran Sungai Kuin. Dalam masyarakat masih ditemui perilaku-perilaku yang merugikan lingkungan Sungai Kuin, seperti pembuangan sampah sembarangan, pencemaran air, dan aktivitas yang dapat merusak ekosistem sungai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala ini. Edukasi yang terus-menerus dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Kuin. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memahami dampak negatif dari perilaku yang merugikan lingkungan sungai dan mengubah perilaku mereka menuju ke arah yang lebih berkelanjutan.

1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 mengenai Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam usaha peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin. Dalam Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa upaya pengelolaan sungai oleh Pemerintah Daerah melibatkan serangkaian kegiatan, yakni perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik menargetkan Sungai Kuin di Banjarmasin. Bertindak sebagai pelaksana Perda, Bidang Sungai dan UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase di Dinas PUPR Kota Banjarmasin dipilih sebagai entitas yang akan memegang tanggung jawab penuh terhadap manajemen sungai di Kota Banjarmasin.

1. Perencanaan

Perencanaan merujuk pada proses pengembangan rencana yang terperinci mengenai tindakan-tindakan konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu dalam suatu program atau proyek. Perencanaan melibatkan identifikasi tujuan, penentuan strategi, pengaturan sumber daya, penjadwalan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah konkret yang harus diambil.

Pada kegiatan perencanaan, terdapat langkah penting yang dilakukan yaitu sosialisasi kebutuhan program kerja kepada berbagai pihak terkait. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan pemahaman yang sama dan mendapatkan masukan serta persetujuan dari berbagai stakeholder terkait dengan kebutuhan dan tujuan program kerja yang sedang direncanakan.

2. Pengembangan

Pengembangan disini merujuk pada proses merancang, mengembangkan, dan menyusun program kerja yang terperinci untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan, penentuan strategi dan tujuan, perencanaan kegiatan, alokasi sumber daya, dan pengaturan langkah-langkah implementasi.

Pada kegiatan pengembangan, yang pertama yaitu berupa pembebasan kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan. Kawasan disini yaitu pinggiran Sungai Kuin yang masih menjadi tempat bermukim warga. Apabila kawasan sudah bersih dari pemukiman maka dilanjutkan kegiatan pembangunan program kerja yang ingin dilakukan.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan disini diartikan sebagai proses penggunaan dan implementasi program kerja yang telah direncanakan dan dikembangkan.

Pada pemanfaatan Sungai Kuin, sungai tersebut telah dijadikan sebagai Bypass atau saluran alternatif dari Sungai Martapura menuju pembuangan akhir ke Sungai Barito. Dalam rangka mendukung pemanfaatan Sungai Kuin tersebut, sering dilakukan perawatan rutin berupa pendalaman sungai. Perawatan rutin dengan melakukan pendalaman sungai dilakukan untuk menjaga kualitas dan kelancaran aliran Sungai Kuin. Proses pendalaman ini bertujuan untuk memperdalam saluran sungai, sehingga dapat menampung volume air yang lebih besar dan mengurangi risiko banjir di sekitarnya. Selain itu, pendalaman sungai juga membantu dalam memperbaiki kondisi sedimentasi yang mungkin terjadi akibat aliran sungai yang lambat.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam hal ini yaitu berupa serangkaian kegiatan dilakukan oleh pihak terkait guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasional program kerja. Tujuan dari pemeliharaan yaitu guna menjaga kualitas, efisiensi dan efektivitas pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pihak terkait diperkuat oleh Satuan Tugas (Satgas) yang kerap dijuluki sebagai Pasukan Turbo. Satgas ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan dan pengawasan sungai secara intensif dan responsif. Selain itu, ada juga dukungan dari pihak Lingkungan Hidup yang melakukan kegiatan rutin yang dikenal sebagai Peduli Sungai. Kegiatan ini tidak hanya terfokus pada Sungai Kuin, tetapi juga melibatkan sungai-sungai lain di Banjarmasin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin pada Sungai Kuin maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 pada Sungai Kuin terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: a. Komunikasi; b. Sumber Daya; c. Disposisi; d. Struktur Birokrasi
2. Pada implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin pada Sungai Kuin terdapat dua faktor yaitu: a. Faktor pendukung; b. Faktor penghambat

REFERENSI

- (1980), G. E. (n.d.). Teori Implementasi Kebijakan. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%2008417141005.pdf>
- A Mumpuni, P. R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sungai (Studi kasus: Sungai Pepe, Sungai Anyar, dan Sungai Premulung, Kota Surakarta). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Partisipatif*, 67-80.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dzinomwa, T. d. (2005). Land-use Impact o River Water Quality in Lowveld Sand River System in South-East Zimbabwe. *Land-use and Water Resource*.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Gultom, A. F. (2019). Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. *waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 17-30.
- Harpani Matnuh, D. A. (2022). Optimalisasi Peran Serta Masyarakat alam Pengelolaan Sungai di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 64-70.
- Purwanto dan Nugroho, D. R. (2017). *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rochgiyanti, R. (2011). Fungsi Sungai bagi Masyarakat di Tepian Sungai Kuin Kota Banjarmasin. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(1), 168898.
- Rochliyadi, H. M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*.
- Subhan, R., Wagiono, F., Humaidi, M. A., & Anhar, D. (2022). Karakteristik Rumah Tangga Miskin Bantaran Sungai Kuin Kota Banjarmasin Era Pandemi Covid-19 Tahun 2022. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 116-126.
- Sulistiyastuti, P. d. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Suriawiria. (2003). *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Syafari, M. R., & Arbain, T. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sungai di kota Banjarmasin. *Jurnal niara*, 14(3), 168-175.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua. Bumi Aksara.

Warmansyah Abbas, E. R. S. I. S. (2018). Kehidupan Sungai Masyarakat Kuin Kota Banjarmasin.

Wholey, Joseph S., Harry P. Hatry & Kathryn E. Newcomer. (2004). Handbook of Practical Program Evaluation. John Wiley & Sons: New Jersey

Wirasatria, A., Hartoko, A., & Suripin, S. (2006). Kajian Kenaikan muka Laut Sebagai Landasan Penanggulangan Rob Di Pesisir Kota Semarang (Study Of Sea Level Rise As A Base For Rob Problem Solving In Coastal Region Of Semarang City). Jurnal Pasir Laut, 1(2), 31-42.

artikel ikhsan

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	10%
2	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	2%
4	snllb.ulm.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.ummi.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.ulm.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

10 repository.uindatokarama.ac.id 1 %
Internet Source

11 s2tekniksipil.ulm.ac.id 1 %
Internet Source

12 ppjp.ulm.ac.id 1 %
Internet Source

13 repository2.unw.ac.id 1 %
Internet Source

14 id.scribd.com 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On